

## **BAB I PENDAHULUAN UMUM**

### **1.1. Latar Belakang**

Pilkada Kota Makassar 2018, awalnya akan diikuti oleh dua pasangan calon walikota dan calon wakil walikota (Paslon). Paslon tersebut adalah Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Disingkat Appi-Cicu) dan pasangan H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti (Disingkat DIAMI). Dua paket pasangan ini kemudian terdaftar di KPU Makassar. Paslon Appi-Cicu didaftarkan oleh Partai Politik sementara DIAMI mendaftar sebagai calon perseorangan, atau kerap disebut calon independen.

Awal tahun 2017, tensi politik menjelang Pilkada Makassar 2018 sudah terbaca di berbagai media utama, media-media online, dan sosial media yang berbasis di Kota Makassar, atau di Provinsi Sulawesi Selatan. Topik utama perbicangannya tersebut adalah bagaimana menghadapi Danny Pomanto yang berstatus Petahana (incumbent) di Pilkada Makassar 2018. Danny atau Danny Pomanto adalah sapaan akrab Mohammad Ramdhan Pomanto. Atau lebih tepatnya adalah bagaimana mengalahkan Danny Pomanto di Pilkada Kota Makassar 2018. Berbagai kelompok politik terus mengkonsolidasi diri untuk menghadapi Danny Pomanto ini. Misi kelompok-kelompok itu relatif sama, yakni bahwa Danny Pomanto harus dikalahkan. Dengan kata lain, harus ditumbangkan.

Pada waktu itu, Danny Pomanto masih menjabat sebagai walikota Makassar. Danny Pomanto menjabat sebagai Walikota Makassar sejak Mei 2014 untuk periode pertama, dan Syamsu Rizal MI sebagai wakilnya. Danny Pomanto dan Syamsu Rizal MI (Disingkat DIA pada waktu Pilkada Kota Makassar 2013) dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Makassar pada 6 Mei 2014, atau delapan bulan setelah

pasangan ini ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh KPU Makassar pada 25 September 2013. Danny Pomanto mengalahkan sembilan paslon. Pilkada Makassar 2013 waktu itu diikuti oleh 10 pasangan calon dengan rincian, 4 pasangan calon diusung oleh partai politik dan 6 pasangan calon lainnya diusung melalui jalur calon perseorangan (jalur independen). Paslon Nomor 8 DIA meraih suara terbanyak 182.484 suara atau 31,18 persen, menyisihkan 9 paslon lainnya. Pesaing terdekat paslon ini adalah paslon Nomor 9, yaitu Irman Yasin Limpo dan Busra Abdullah dengan perolehan suara 114.032 atau 19,48 persen.

Sembilan pasangan calon yang dikalahkan oleh pasangan Danny Pomanto dan Syamsul Rizal MI adalah paslon Adil Patu dan Isradi Zaenal (Nomor Urut 1, diusung Partai PDK dan Partai Gerindra), Supomo Guntur dan Kadir Halid (Nomor Urut 2, diusung Partai Golkar), Rusdin Abdullah dan Idris Patarai (Nomor Urut 3, diusung di jalur perseorangan), Herman Handoko dan Latif Bafadal (Nomor Urut 4, diusung di jalur perseorangan), Erwin Kallo dan Hasbi Ali (Nomor Urut 5, diusung di jalur perseorangan), Tamsil Linrung dan Das'ad Latif (Nomor Urut 6, diusung oleh Partai PKS, Partai Hanura, dan Partai PBR), Muhyna Muin dan Syaiful Saleh (Nomor Urut 7, diusung di jalur perseorangan), Danny Pomanto dan Syamsu Rizal (Nomor Urut 8, diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PBB), Irman Yasin Limpo dan Busra Abdullah (Nomor Urut 9, diusung oleh Partai PAN dan Partai PPP), dan Apiaty Amin Syam dan Zulkifli Gani Otto (Nomor Urut 10, diusung di jalur perseorangan).

Kemenangan Paslon DIAMI ini diibaratkan seperti lolos dari lubang jarum. Berbagai kekuatan dan rintangan dihadapi oleh pasangan calon ini. Rintangan yang sangat nyata adalah mengalahkan 9 paslon. Jumlah 9 ini tidak seperti pilkada biasanya yang diikuti oleh

paling banyak 5 calon. Selain itu, paslon-paslon kompetitor DIA juga mempunyai jaringan politik dan jaringan kekuasaan yang efektif dapat mempengaruhi perpolitikan di Kota Makassar dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Irman Yasin Limpo, adik kandung Syahrul Yasin Limpo (mantan gubernur Sulawesi Selatan periode 2007-2012 dan 2012-2017), ketua DPD Golkar Sulsel (2009-2016), mantan bupati Kabupaten Gowa (1993-1998 dan 1998-2003). Pada saat yang sama dengan masa tahapan Pilkada Kota Makassar 2013 waktu itu, kakak kandung Irman YL, yaitu Ichsan YL, juga sedang menjabat sebagai bupati Kabupaten Gowa (2005-2010 dan 2010-2015), kabupaten yang persis berbatasan dengan sisi selatan Kota Makassar.

Berikutnya adalah Supomo Guntur. Mantan Sekretaris Daerah Kota Makassar ini sedang menjabat ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar (2009-2014) dan Wakil walikota Makassar periode 2009-2014 (Wakil dari Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) pada periode kedua). Tokoh kompetitor lainnya adalah Apiaty Amin Syam. Apiaty adalah istri dari politisi senior Partai Golkar Amin Syam yang juga mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (2003-2008). Amin Syam juga pernah menjabat ketua DPD Golkar Sulsel dua periode (1999-2004 dan 2004-2008) dan mantan Ketua DPRD Sulsel 1997-2003.

Selain dari rintangan di atas, Paslon DIA juga harus berjuang keras menghadapi gugatan Paslon Supomo Guntur dan Kadir Halid, Muhyina Muin dan Syaiful Saleh, serta Irman Yasin Limpo dan Busra Abdullah di Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon Irman-Busra dan Supomo-Kadir disebut-sebut sebagai pihak yang sangat serius hendak memenangi perkara di MK. KPU Kota Makassar sebagai pihak tergugat dan Paslon Danny-Ical sebagai pihak terkait, pada akhirnya berhasil

memenangi gugatan hasil Pilkada Kota Makassar 2013. Gugatan tiga paslon tersebut ditolak seluruhnya oleh hakim konstitusi di MK pada 23 Oktober 2013. Setelah putusan MK tersebut, KPU Kota Makassar menetapkan Paslon DIA sebagai paslon terpilih melalui rapat pleno akhir Oktober 2013.

Berkaca pada dinamika politik selama tahapan Pilkada Kota Makassar 2013 di atas, maka porsi kemenangan Paslon DIA yang hanya 31,18 persen ini, dianggap sebagai kelemahan karena tidak cukup legitimatif oleh opini publik di Kota Makassar pada saat itu. Asumsi lemah itu berlanjut pada selama Danny Pomanto menjalankan roda pemerintahan di Kota Makassar pada periode pertama (2014-2019). Lagi pula terhitung sejak 2015 atau setahun setelah dilantik, Danny Pomanto sudah tidak sejalan dengan Wawali Syamsu Rizal MI dalam menjalankan roda pemerintahan kota. Peran formal maupun informal Wawali Syamsu Rizal MI dilemahkan sedemikian rupa di pemerintahan Danny Pomanto, sebagaimana kerap diwacanakan oleh media-media dan perbincangan publik Kota Makassar. Eksistensi Syamsu Rizal MI tidak bisa dipisahkan dari IAS, karena IAS dikenal sebagai tokoh yang berperan besar sehingga Syamsu Rizal diterima oleh Danny Pomanto menjadi wakilnya pada Pilkada Kota Makassar 2013.

Atas dasar itu semua, politisi-politisi yang oposan atau yang anti Danny Pomanto, yang juga masih merupakan imbas hasil Pilkada Kota Makassar 2013, terus merajut optimisme dan ekspektasi besar untuk melawan kembali Danny Pomanto dan mengalahkannya pada Pilkada Kota Makassar 2018. Komunikasi politik di antara mereka terus belajalan yang kemudian menghasilkan Paslon Appi-Cicu pada Pilkada Kota Makassar 2018. Pada sisi lain, kondisi sebelum Pilkada Kota Makassar 2018, kelompok-kelompok masyarakat yang berafiliasi

dengan mantan walikota Makassar IAS juga mengkonsolidasikan diri untuk menghadapi kekuatan Danny Pomanto.

Ikhwal hubungan antara Danny Pomanto dan IAS, itu bermula pada saat IAS menjabat walikota Makassar periode kedua (2009-2014). Momen hubungan erat dan penting antara Danny Pomanto dan IAS adalah saat keduanya berkantor di Balaikota Makassar. Saat itu, IAS adalah walikota Makassar dan Danny Pomanto sebagai staf khusus dan sekaligus konsultan tata ruang. Pernah dalam suatu kesempatan, IAS menggambarkan pentingnya Danny Pomanto bagi dirinya. Saat momen itu, IAS menggambarkan peran Danny Pomanto, bahwa separuh dari otaknya dalam memimpin Kota Makassar itu ada pada Danny Pomanto. Demikian juga saat IAS menghadiri undangan-undangan nasional dan internasional, Danny Pomanto selalu terlihat mendampingi. Hubungan akrab di atas disebut-sebut sebagai modal yang membuat Danny Pomanto mendapat sokongan besar dari IAS selama Pilkada Kota Makassar 2013. Kalangan komunitas IAS menyakini bahwa kemenangan Danny Pomanto pada Pilkada Kota Makassar 2013 merupakan hasil kerja besar IAS dan jaringannya. Dengan kata lain, peran IAS sangat penting bagi Danny Pomanto di Pilkada Kota Makassar 2013.

Setelah setahun perjalanan pemerintahan Danny Pomanto bersama Syamsu Rizal MI di Kota Makassar, kualitas hubungan baik antara Danny Pomanto dan IAS mengalami penurunan besar. Salah satu tandanya adalah hilangnya peran Wakil Walikota Syamsu Rizal MI di pemerintahan. Syamsu Rizal MI dikenal luas sebagai representase IAS di tubuh pemerintahan yang dipimpin Danny Pomanto. Publik menyaksikan kerenggangan hubungan baik kedua tokoh ini terus melebar dari tahun ke tahun, dan puncaknya terjadi pada tahapan

Pilkada Kota Makassar 2018 yang mulai bergulir sejak pertengahan 2017.

Elemen-elemen politik di Kota Makassar yang berseberangan dengan Danny Pomanto sebagaimana telah digambarkan di atas, terkonsolidasi dengan sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan adanya keputusan dari Syamsu Rizal MI untuk ikut mengikutkan diri berkompetisi pada Pilkada Makassar 2018. Ketidak-ikutsertaan Syamsu Rizal MI ini memberi peluang besar bagi Munafri mendapatkan sokongan besar dari IAS. Selain itu, terpilihnya ponakan IAS Andi Rachmatika Dewi atau Cicu menjadi calon wakil walikota Makassar mendampingi calon walikota Munafri Arifuddin, dipandang ikut memperkuat perlawanan jaringan politik IAS untuk melawan Danny Pomanto di Pilkada Kota Makassar 2018.

Untuk menghadapi bakal munculnya koalisi besar di Pilkada 2018 di atas, Danny Pomanto juga melakukan persiapan politik. Sejak awal menuju Pilkada Kota Makassar Juni 2018, Danny Pomanto terus menggalang dukungan partai-partai politik. Hingga bulan Desember 2017, Danny Pomanto telah mendapatkan komitmen dan dukungan dari delapan partai politik di Kota Makassar. Partai politik tersesbut adalah PDI Perjuangan (4 kursi), PPP (5 kursi), PKS (5 kursi), Gerindra (5 kursi), PAN (4 kursi), PKPI (1 kursi), Partai Perindo (non parlemen), Partai Idaman (non parlemen), dan Beringin Karya (non parlemen). Sementara itu, Munafri Arifuddin mengamankan Partai Golkar (8 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), Partai Gerindra (5 kursi), Partai Hanura (3 kursi), dan Partai PBB (non parlemen). Meskipun telah mendapatkan kepastian dukungan dari 5 parpol di atas, pihak Munafri tidak berhenti melakukan penetrasi, yakni dengan meningkatkan komunikasinya dengan parpol-parpol yang telah memberikan dukungan kepada Danny Pomanto.

Akibat penetrasi kubu Munafri di atas, pihak Danny Pomanto menemukan adanya realitas politik baru yang intinya bahwa jumlah dukungan kursi parpol untuk Danny bakal tidak cukup untuk memenuhi syarat mendaftar di KPU Makassar nantinya. Danny Pomanto lalu membalik haluan ke jalur perseorangan atau populer dengan istilah jalur calon independen. Danny meninggalkan sejumlah partai pendukung yang tidak kunjung mengeluarkan dukungan tertulis dari dewan pimpinan pusat di Jakarta. Hingga awal Januari 2018, hanya DPC Demokrat Kota Makassar yang masih bisa berkomunikasi dengan DPP Partai Demokrat untuk mempersiapkan surat dukungan dan pencalonan kepada Paslon DIAMI.

Pada Rabu 10 Januari 2018, Paslon Appi-Cicu datang ke KPU Kota Makassar. Paslon ini didaftarkan oleh 10 parpol, yakni Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP, PDIP, Partai Bulan Bintang, PAN, PKS, Gerindra, dan PKS. Enam dari 10 parpol tersebut merupakan parpol yang membelot dari kubu Danny Pomanto. Ke-10 parpol tersebut disahkan oleh KPU Kota Makassar sebagai parpol pengusung dan pendukung Paslon Appi-Cicu dan dengan demikian, KPU Makassar mensahkan pendaftara Paslon Appi-Cicu. Dua hari sebelumnya, 8 Januari 2018, DIAMI mendaftarkan diri di KPU Makassar melalui jalur perseorangan, dengan tetap ikut diantar oleh Partai Demokrat. KPU Kota Makassar mensahkan pendaftaran Paslon DIAMI ini melalui jalur perseorangan atau jalur independen karena telah terverifikasi mendapatkan dukungan dari 117.492 pemilik KTP warga Kota Makassar. Syarat untuk mendaftar calon perseorangan di Pilkada Makassar 2018 harus mendapatkan dukungan minimal 65.000 pemilik KTP warga Kota Makassar.

Selama tahapan pencalonan dan tahapan kampanye berjalan, kubu Paslon Appi-Cicu menggugat kebijakan walikota Makassar Danny

Pomanto ke Panwaslu Kota Makassar dan penetapan Paslon DIAMI oleh KPU Makassar ke PTTUN Makassar. Paslon Appi-Cicu mempersoalkan kebijakan pengadaan Telpon Pintar (Smartphone) kepada 6 ribuan RT/RW sekota Makassar yang dianggap melanggar ketentuan kampanye. Untuk kebijakan ini, Panwaslu Kota Makassar memutuskan Danny Pomanto tidak melanggar hukum. Sementara untuk gugatan tentang keabsahan pencalonan DAAMI, PTTUN Makassar menetapkan bahwa penetapan DIAMI sebagai calon yang sah oleh KPU Kota Makassar adalah tidak sah, dan oleh karena itu Paslon DIAMI harus dibatalkan. Paslon DIAMI lalu mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Makassar itu di Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA memperkuat putusan PTTUN Makassar. Artinya, KPU Kota Makassar wajib membatalkan paslon DIAMI sebagai calon walikota dan calon wakil walikota Makassar Pilkada Kota Makassar 2018. KPU Kota Makassar mencoret paslon DIAMI dari daftar calon walikota dan calon wakil walikota Makassar Pilkada Kota Makassar 2018.

Atas dasar keputusan MA di atas, paslon Appi-Cicu ditetapkan oleh KPU Makassar sebagai calon tunggal. Pasangan lainnya, DIAMI, digugurkan oleh KPU Makassar karena tidak memenuhi syarat sebagai calon sebagaimana keputusan MA di atas. Konsekuensinya, surat suara pada hari pencoblosan 27 Juni 2018, hanya menampilkan dua pilihan, yakni Pasangan Appi-Cicu dan Kotak Kosong (tanpa gambar pasangan calon). Sebagai catatan, Pilkada Kota Makassar 2018 membolehkan memilih salah satu, yakni memilih Pasangan Appi-Cicu Nomor Urut 1 atau memilih Kotak Kosong Nomor Urut 2.

Pada hari pencoblosan 27 Juni 2018, secara mengejutkan, beberapa lembaga survei memprediksi Kota Kosong menang, mengalahkan Paslon Appi-Cicu. Kotak Kosong menang dengan

perolehan suara 300.795 dan Appi-Cicu memperoleh 264.245 (Kompas.com). Dalam persentase, kemenangan Kotak Kosong mendapat 53,23% dan Appi-Cicu mendapat 46,77%. Setelah rekapitulasi di KPU Kota Makassar, komposisi hasil penghitungan suara tidak berubah. Kotak Kosong mengalahkan Pasangan Appi-Cicu. Pilkada Kota Makassar dilanjutkan ke Pilkada Serentak putaran berikutnya, yakni Pilkada Serentak 2020. Pemerintahan Kota Makassar akan dipimpin oleh Pejabat (Pj) sampai dilantikan Paslon walikota terpilih hasil Pilkada Kota Makassar 2020.

Hasil pilkada Kota Makassar 2018 di atas melahirkan realitas sosial baru di Kota Makassar. Dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat (bisa juga disebut pemilih) Kota Makassar ternyata lebih memilih kotak kosong dari pada memilih pasangan calon. Padahal, Kotak Kosong tidak sama sekali merepresentasikan suatu visi, misi dan program yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Makassar dan Kota Makassar itu sendiri. Jika Kotak Kosong menang, tidak ada wujud yang duduk untuk menjalan roda pemerintahan dan pembangunan. Sementara pasangan calon sebagai calon tunggal, eksistensinya sangat nyata merepresentasikan adanya visi, misi dan program yang merupakan janji kepada masyarakat Kota Makassar. Jika pasangan calon menang, mereka bisa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian, pilihan masyarakat Kota Makassar, bisa jadi merupakan anomali demokrasi pada pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia. Pada sisi komparasi rasionalitas, lebih rasional memilih pasangan calon daripada memilih Kotak Kosong. Namun faktanya, mayoritas masyarakat Kota Makassar lebih memilih Kota Kosong, lebih sedikit yang memilih pasangan calon. Dalam konteks ini, pilihan masyarakat kepada pasangan calon merupakan realitas yang

dapat dengan dipahami. Namun pilihan masyarakat kepada Kota Kosong merupakan realitas yang tidak mudah dipahami begitu saja. Dibutuhkan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap prerefensi masyarakat sehingga mereka memberikan dukungan kepada Kota Kosong.

### **1.1.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan alat ukur untuk melihat perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian baru yang ingin dilaksanakan, suatu penelitian memiliki penelitian yang hamper sama yang dilaksanakan dengan penelitian lainnya yang membedakan adalah terdapat pada subjek atau Lokasi penelitian, yang berbed. Peneliti mengurai penelitian ini yang menyerupai judul penelitian yaitu etos kerja. Berikut dibawah ini :

Pertama, Astifa Indah Nigrawati (2019) Pencalonan Pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan Dinamika pencalonan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari yaitu keterpilihan sosok Indira Mulyasari sebagai pasangan Danny Pomanto adalah sebagai seorang politisi muda perempuan yang memiliki sumber daya yang memadai dapat merepresentasikan keinginan pemilih serta dipandang sosok yang nyaman dan bisa sejalan tanpa ada kesan mengimbangi kekuatan dari pasangannya ketika terpilih, Pertimbangan keputusan DPP dalam mengusung Danny Pomanto-Indira Mulyasari ini tidak terlepas dari adanya kepentingan partai politik yang berhasil dikomunikasikan di tingkat pusat sehingga usungan beralih kepasangan lawan politik dan dinamika upaya kriminalisasi yang dialami oleh Danny Pomanto tidak serta merta dilihat sebagai kondisi yang wajar dialami ketika seorang aktor yang sedang menjabat tersebut mendapatkan permasalahan

hukum. Sebab ketika melihat momen atau waktu terjadinya kisruh tersebut sangat berkaitan ketika elektabilitas dari aktor masih tinggi dibandingkan dengan lawan politiknya. Proses diskualifikasi terhadap Paslon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 tidak terlepas dari berbagai penyebab yaitu Tuntutan Memanfaatkan kewenangan sebagai petahana memberikan efek keuntungan tersendiri bagi Danny Pomanto jika program tersebut berjalan dengan baik. Artinya, hal ini tentu berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat (social trust) kepada Danny Pomanto jika mampu menyelesaikan janji-janji programnya ketika terpilih menjadi Walikota dan perbedaan perspektif keputusan mengenai terdiskualifikasinya pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari tidak terlepas dari pengaruh kekuatan Munafri Arifuddin yang diusung oleh sepuluh partai politik dan tim pemenangan yang sangat terstruktur dengan baik.

Kedua, Ayu Lestari, dkk Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hasil menunjukkan Faktor penyebab pencalonan tunggal dalam Pemilukada dibagi menjadi faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis, diawali dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak. Faktor non yuridis, bahwa : proses pencalonan membutuhkan biaya tinggi ada adanya money politic; lemahnya daya saing bakal calon dalam kompetisi politik;

kepentingan politik para elite politik; dan kegagalan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa motivasi masyarakat kota Makassar sehingga memilih Kotak Kosong dari pada memilih pasangan calon pada Pilkada Kota Makasssar 2018; dan
2. Apa harapan masyarakat Kota Makassar sehingga memilih Kota Kosong dari pada memilih pasangan calon pada Pilkada Kota Makasssar 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan tentang motivasi masyarakat kota Makassar yang memilih Kotak Kosong dari pada memilih pasangan calon pada Pilkada Kota Makasssar 2018; dan
2. Untuk menjelaskan tentang harapan masyarakat Kota Makassar sehingga memilih Kotak Kosong dari pada memilih pasangan calon pada Pilkada Kota Makasssar 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada pun manfaat dari hasil penelitian ini:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku-pelaku politik pemilu dalam membaca dan memahami pikiran serta kecenderungan masyarakat pemilih di Kota Makassar dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum.
2. Hasil penelitian dapat menambah ragam referensi akademik tentang perilaku masyarakat Kota Makassar dalam menentukan pilihannya, khususnya dalam pemilihan calon kepala daerah.

## **1.5 Kerangka Konsep**

Preferensi Sosial Pemilih Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 dibangun dengan mempertimbangkan kompleksitas fenomena sosial-politik yang terjadi di Kota Makassar. Fenomena pemilihan kotak kosong dalam Pilkada 2018 menjadi titik fokus yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosiologis, terutama dengan menggunakan lensa teori tindakan rasional yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori ini menjadi landasan utama dalam memahami preferensi sosial masyarakat Makassar, menekankan bahwa tindakan individu, dalam hal ini pilihan untuk memilih kotak kosong, didasari oleh pertimbangan rasional yang berorientasi pada tujuan tertentu.

Melalui kerangka ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana rasionalitas pemilih berperan dalam pengambilan keputusan tersebut, dengan memperhatikan dua aspek utama: motivasi dan harapan masyarakat. Motivasi masyarakat Makassar dalam memilih kotak kosong menjadi salah satu fokus utama penelitian ini. Berbagai faktor yang mendorong keputusan ini akan diteliti, mulai dari kemungkinan adanya ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia, bentuk protes terhadap sistem politik yang ada, hingga ekspresi partisipasi politik alternatif. Sementara itu, aspek harapan masyarakat akan memberi gambaran tentang ekspektasi dan aspirasi warga Makassar yang tercermin melalui pilihan kotak kosong. Hal ini dapat mencakup harapan akan perubahan sistem politik, peningkatan kualitas kepemimpinan, atau reformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam menganalisis motivasi dan harapan ini, konsep rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai dari Weber akan diaplikasikan. Rasionalitas instrumental berkaitan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan, sementara rasionalitas nilai berfokus pada komitmen terhadap nilai-

nilai tertentu tanpa terlalu mempertimbangkan prospek keberhasilan. Kedua bentuk rasionalitas ini akan membantu menjelaskan logika di balik preferensi pemilih kotak kosong, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan kolektif dalam konteks politik lokal.

Konteks sosial-politik Kota Makassar menjadi latar belakang yang tak terpisahkan dalam kerangka konsep ini. Faktor-faktor seperti sejarah politik lokal, dinamika kekuasaan, dan perkembangan demokrasi di tingkat daerah akan dipertimbangkan sebagai elemen yang mempengaruhi preferensi pemilih. Selain itu, identitas sosial dan budaya masyarakat Makassar juga akan menjadi pertimbangan penting, mengingat nilai-nilai budaya, norma sosial, dan identitas kolektif dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini akan membantu mengungkap bagaimana konteks lokal yang unik di Makassar berkontribusi pada munculnya fenomena pemilihan kotak kosong.

Partisipasi politik juga akan diintegrasikan dalam kerangka ini, dengan melihat pemilihan kotak kosong sebagai bentuk partisipasi yang unik. Hal ini akan dikaitkan dengan teori-teori partisipasi politik dalam konteks demokrasi lokal, untuk memahami bagaimana fenomena ini mungkin mencerminkan pergeseran atau inovasi dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Lebih lanjut, penelitian akan mengeksplorasi apakah pemilihan kotak kosong dapat dilihat sebagai bentuk 'exit' dalam kerangka 'exit, voice, and loyalty' yang dikemukakan oleh Albert O. Hirschman, di mana pemilih memilih untuk 'keluar' dari pilihan yang tersedia sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan.

Kepercayaan politik (political trust) menjadi variabel penting lainnya dalam kerangka konsep ini. Tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap institusi politik dan para kandidat akan diteliti untuk memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan memilih kotak kosong. Berkaitan dengan ini, konsep alienasi politik juga akan dipertimbangkan untuk menganalisis apakah pilihan kotak kosong merupakan manifestasi dari perasaan teralienasi dari sistem politik yang ada. Penelitian akan menggali lebih dalam tentang bagaimana pengalaman historis masyarakat Makassar dengan pemerintahan dan proses politik sebelumnya mungkin berkontribusi pada tingkat kepercayaan dan alienasi politik yang ada.

Faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak luput dari perhatian dalam kerangka konsep ini. Kondisi ekonomi dan harapan akan perbaikan kesejahteraan akan diteliti sebagai variabel yang mungkin mempengaruhi preferensi pemilih. Selain itu, peran media dan opini publik juga akan dianalisis untuk memahami bagaimana informasi dan diskursus publik membentuk persepsi dan preferensi masyarakat terhadap pilihan kotak kosong. Analisis akan mencakup bagaimana narasi-narasi tertentu di media sosial dan media massa mungkin telah mempengaruhi atau memperkuat kecenderungan untuk memilih kotak kosong.

Legitimasi politik menjadi aspek penting lainnya yang akan dikaji. Penelitian akan menggali bagaimana pilihan kotak kosong mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi hasil Pilkada dan implikasinya terhadap pemerintahan yang akan terbentuk. Hal ini akan dikaitkan dengan dinamika kelompok dan pengaruh sosial, untuk memahami bagaimana interaksi sosial dan tekanan kelompok mungkin mempengaruhi keputusan individu dalam memilih kotak kosong. Lebih lanjut, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana fenomena ini mungkin mencerminkan pergeseran dalam konsep legitimasi politik di

tingkat lokal, di mana masyarakat mungkin mulai mendefinisikan ulang apa yang mereka anggap sebagai kepemimpinan yang legitimate.

Aspek hukum dan regulasi Pilkada juga akan menjadi bagian dari analisis, mengkaji bagaimana kerangka hukum yang ada memungkinkan dan mempengaruhi pilihan kotak kosong serta implikasinya terhadap proses demokrasi. Untuk memberikan konteks yang lebih luas, penelitian ini juga akan melakukan perbandingan dengan fenomena serupa di daerah atau negara lain, membantu menempatkan kasus Makassar dalam perspektif yang lebih komprehensif. Analisis komparatif ini akan membantu mengidentifikasi pola-pola umum atau keunikan kasus Makassar dalam konteks global perkembangan demokrasi.

Terakhir, kerangka konsep ini akan memasukkan analisis tentang peran tokoh-tokoh kunci atau opinion leader dalam masyarakat Makassar. Penelitian akan menggali bagaimana individu-individu berpengaruh, baik dari kalangan politik, agama, atau masyarakat sipil, mungkin telah mempengaruhi opini publik dan preferensi pemilih. Ini akan membantu memahami dinamika kepemimpinan informal dan pengaruhnya terhadap perilaku politik kolektif di Makassar.

Dengan kerangka konsep yang komprehensif dan mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang fenomena pemilihan kotak kosong di Kota Makassar. Tidak hanya sebagai peristiwa politik lokal, tetapi juga sebagai cerminan dari dinamika sosial yang lebih luas dalam konteks demokrasi Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang demokrasi partisipatif di tingkat lokal dan menawarkan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik demokrasi di masa depan.

## **BAB II**

### **MOTIVASI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR SEHINGGA MEMILIH KOTAK KOSONG DARI PADA MEMILIH PASANGAN CALON PADA PILKADA KOTA MAKASSAR 2018**

#### **2.1 Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar tahun 2018 mencatatkan sejarah baru dalam demokrasi Indonesia ketika untuk pertama kalinya kotak kosong berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal. Fenomena ini menjadi sorotan nasional dan menimbulkan berbagai diskusi mendalam tentang dinamika politik lokal serta perilaku pemilih di Kota Makassar. Awal mula fenomena ini terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mendiskualifikasi pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAMI) dari pencalonan, menyisakan hanya pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Keputusan KPU ini menindak-lanjuti keputusan Kasasi Mahkamah Agung, yang menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usana Negara (PT TUN) Makassar sebelumnya. Sebelum adanya putusan PT TUN Makassar, Pasangan DIAMI ini sudah digugat oleh Paslon Appi-Cicu ini ke Panwaslu Kota Makassar. Namun Panwaslu Kota Makassar menolak gugatan itu dan tetap menyatakan bahwa pencalonan Paslon DIAMI sudah sah menurut aturan.

Keputusan diskualifikasi tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran yang dilakukan petahana Danny Pomanto terkait penggunaan program dan kegiatan Pemkot Makassar untuk kepentingan kampanye. Situasi ini akhirnya menciptakan kondisi dimana hanya tersisa satu pasangan calon yaitu Appi-Cicu yang harus berhadapan dengan kotak kosong. Masyarakat Kota Makassar yang dikenal memiliki karakter kritis dan independen, mulai menunjukkan respon yang menarik terhadap situasi politik tersebut. Berbagai kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan pemuda mulai melakukan gerakan untuk mendukung kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap proses politik yang dianggap tidak memenuhi aspirasi mereka.

Faktor kekecewaan terhadap elite politik lokal menjadi salah satu pendorong utama masyarakat untuk memilih kotak kosong. Masyarakat menilai bahwa proses politik yang terjadi lebih didominasi oleh kepentingan elit dan kurang memperhatikan aspirasi *grassroot*. Sentimen anti-oligarki juga muncul ketika pasangan Appi-Cicu dianggap merepresentasikan kekuatan ekonomi politik yang dominan di Kota Makassar. Munafri Arifuddin yang merupakan keponakan dari Aksa Mahmud, pengusaha besar di Sulawesi Selatan, dianggap sebagai simbol oligarki yang ingin menguasai politik lokal.

Faktor kedekatan emosional masyarakat dengan Danny Pomanto yang terdiskualifikasi juga tidak bisa diabaikan. Selama masa kepemimpinannya, Danny Pomanto dikenal dekat dengan masyarakat dan memiliki berbagai program pro-rakyat yang cukup populer. Gerakan sosial media dengan hashtag #KolomKosong menjadi viral (populer) dan mampu memobilisasi dukungan terutama dari kalangan milenial dan pemilih muda. Hashtag ini menjadi simbol perlawanan dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Tingginya akses informasi dan literasi politik masyarakat Kota Makassar turut berkontribusi pada fenomena ini. Masyarakat mampu menganalisis situasi politik dan mengambil sikap kritis terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Kultur Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi harga diri (*siri'*) dan kemandirian turut mempengaruhi sikap politik masyarakat. Mereka menolak untuk sekadar menerima pilihan politik yang tersedia tanpa mempertimbangkan kualitas dan integritasnya.

Pengalaman historis Kota Makassar sebagai kota perjuangan dan basis gerakan demokrasi di Indonesia Timur, juga membentuk kesadaran politik masyarakatnya. Tradisi perlawanan terhadap ketidakadilan telah mengakar dalam memori kolektif warga. Fenomena ini juga tidak lepas dari peran *civil society* yang aktif melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Berbagai LSM, organisasi mahasiswa, dan kelompok study mampu membangun kesadaran kritis tentang pentingnya partisipasi politik yang berkualitas. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Makassar yang

relatif mapan dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, turut mendukung kemampuan mereka untuk mengambil keputusan politik secara rasional dan independen.

Ketidak-puasan terhadap kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan juga menjadi faktor pendorong. Masyarakat menilai bahwa partai politik gagal menghadirkan calon pemimpin yang berkualitas. Trauma politik *money politics* dan praktik politik transaksional di masa lalu membuat masyarakat lebih selektif dalam menentukan pilihan politik. Mereka tidak ingin terjerumus kembali dalam praktik politik pragmatis yang merugikan demokrasi. Media massa lokal yang relatif independen dalam memberitakan proses Pilkada turut membangun kesadaran kritis masyarakat. Pemberitaan yang berimbang membantu masyarakat memahami kompleksitas situasi politik yang terjadi.

Keberadaan tokoh-tokoh masyarakat dan *opinion leader* yang vokal mendukung kotak kosong memberikan legitimasi sosial terhadap pilihan tersebut. Mereka mampu mengartikulasikan argumentasi politik yang meyakinkan kepada masyarakat. Fenomena urbanisasi dan modernisasi di Kota Makassar telah menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan kritis terhadap proses politik. Mereka tidak lagi mudah dimobilisasi berdasarkan sentiment primordial atau patronase politik. Kekecewaan terhadap proses hukum yang dianggap tidak adil dalam proses diskualifikasi pasangan calon, juga mendorong sikap resistensi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa ada intervensi politik dalam proses hukum tersebut.

Pengalaman berdemokrasi sejak era reformasi telah membentuk kesadaran politik masyarakat Kota Makassar yang semakin matang. Mereka memahami bahwa suara mereka memiliki makna penting dalam proses demokratisasi. Keberadaan ruang-ruang diskusi publik, baik formal maupun informal, memungkinkan terjadinya deliberasi politik yang intensif di kalangan masyarakat. Mereka dapat mendiskusikan dan menganalisis situasi politik secara lebih mendalam.

Fenomena global terkait kebangkitan gerakan politik akar rumput dan penolakan terhadap elit politik tradisional juga turut mempengaruhi kesadaran politik masyarakat Kota Makassar. Ketika hasil akhir Pilkada menunjukkan kemenangan kotak kosong, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Makassar telah mencapai tingkat kedewasaan politik yang tinggi. Mereka mampu menggunakan hak pilih mereka sebagai instrumen kontrol terhadap proses demokrasi. Keberhasilan kotak kosong di Pilkada Makassar 2018 menjadi pembelajaran berharga bagi proses demokratisasi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menolak pilihan politik yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka dan mencari alternatif lain melalui mekanisme demokratis yang tersedia.

Fenomena kemenangan kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018 ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan proses politik yang berlangsung. Diskualifikasi pasangan petahana Danny Pomanto-Indira Mulyasari yang dinilai kontroversial, menyisakan hanya satu pasangan calon yaitu Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, telah menciptakan situasi dimana masyarakat merasa kehilangan alternatif pilihan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Kondisi ini diperparah dengan persepsi masyarakat terhadap pasangan calon tunggal yang dianggap merepresentasikan kekuatan oligarki dan elite politik yang selama ini mendominasi perpolitikan lokal di Sulawesi Selatan dan di Makassar.

Permasalahan ini kemudian berkembang menjadi fenomena sosial politik yang lebih kompleks ketika masyarakat Kota Makassar, yang dikenal memiliki karakteristik kritis dan independen, memilih untuk memberikan dukungan kepada kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap proses demokrasi yang dianggap tidak aspiratif. Motivasi masyarakat dalam mendukung kotak kosong menjadi isu penting untuk dikaji mengingat hal ini bukan sekadar fenomena politik temporal, melainkan manifestasi dari akumulasi berbagai faktor sosial, budaya, dan politik yang telah lama terbangun dalam struktur sosial masyarakat Kota Makassar.

## **2.2. Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Pengertian Motivasi dalam perspektif sosiologi**

Perilaku manusia pada dasarnya selalu ditentukan oleh dua faktor utama yaitu faktor yang datang dari luar dan faktor yang datang dari dalam dirinya sendiri. Faktor-faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri, itulah yang biasa disebut dengan motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan dalam diri individu yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi sendiri bisa terjadi apabila adanya dorongan dari manusia itu sendiri untuk mengubah dirinya sendiri. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai sumber penggerak tingkah laku, dan dianggap sebagai disposisi yang relatif stabil (Hamalik, 2019).

Motivasi juga dapat diartikan sebagai semua penggerak atau dorongan dalam diri manusia itu sendiri yang menyebabkan seorang berbuat sesuka hati. Motivasi bagi manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat yang menjadi penggerak yang berasal dari dalam diri manusia yang memberi tujuan atau arah kepada tingkah laku manusia (Husdarta, 2019:23). Motivasi adalah proses aktualisasi generator penggerak internal di dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas, menjamin kelangsungannya dan menentukan arah atau haluan aktivitas terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Husdarta, 2019:31). Menurut Husdarta (2019:33) Motivasi juga dapat dipandang sebagai suatu proses psikologi yang runtutannya yaitu sebagai berikut: 1) Sesuatu yang menimbulkan dorongan kepada seseorang, sesuatu tersebut dapat digambarkan, misal keinginan menjadi juara dan rangsangan ini merupakan suatu faktor yang ada di luar individu. 2) Seseorang mempunyai keinginan untuk bisa menjadi juara, karena dirangsang oleh keinginan untuk menjadi juara menjadi yang terbaik. 3) Keinginan menjadi juara dipengaruhi oleh berbagai faktor intrinsik, antara lain sifat-sifat pribadi yang melekat sebagai unsur kepribadiannya, sistem nilai yang dianut (dasar pandangan), kedudukan atau jabatan, pengalaman-pengalaman professional, cita-cita masa depan yang diinginkan dan lain-lain. 4) Faktor di luar diri yang berpengaruh. 5) Adanya dua factor yang berpengaruh dan

menimbulkan berbagai alternatif yang harus dipilih. 6) Renungkan dan sesuaikan kondisi objektif kebutuhan. 7) Tentukan salah satu pilihan yang cocok. 8) Pengambilan keputusan tindakan. Menurut teori pengharapan yang dikemukakan oleh Vroom dalam Handoko (2019:32) yaitu “Motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, motivasi adalah proses aktualisasi generator penggerak internal di dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas, menjamin kelangsungannya dan menentukan arah atau haluan aktivitas terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.2.2 Faktor Motivasi dan Kategori Motivasi**

Bagian ini akan membedakan pengertian motivasi secara umum dengan motivasi lainnya. Motivasi secara umum diartikan sebagai kegiatan melibatkan diri dalam suatu aktivitas tertentu untuk memperoleh hasil atau mencapai sasaran tertentu. Sedangkan motivasi lainnya dapat berupa motivasi berprestasi, motivasi untuk menguasai orang lain, motivasi untuk bertindak secara kompeten, dan motivasi untuk beraktualisasi diri. Jenis-jenis motivasi tersebut perlu dibedakan supaya masyarakat dapat mempertimbangkan jenis motivasi yang tepat untuk memilih para calon kepala daerahnya. Dengan demikian, motivasi dalam hal ini dikembangkan menjadi lebih terarah dan lebih jelas (Satiadarma 2018).

Motivasi manusia yang telah dikembangkan oleh Maslow menjelaskan bahwa motivasi dipicu oleh usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan (Mathis dan Jackson, 2018:76). Maslow (Maslow, A.H. 2013) mengklasifikasikan kebutuhan manusia yang diurutkan menjadi lima kategori. Hierarki kebutuhan Maslow ini terdiri atas: a. Fisiologis, antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kebutuhan jasmani lain. b. Keamanan, antara lain kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. c. Sosial, antara lain kasih sayang, rasa saling memiliki, diterima-baik, persahabatan. d. Penghargaan, antara lain mencakup faktor

penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor penghormatan diri luar seperti misalnya status, pengakuan dan perhatian. e. Aktualisasi Diri, merupakan dorongan untuk menjadi seseorang atau sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Dengan demikian, pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Ada juga faktor motivasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah yang diklasifikasikan (Ilham dan Titin Purwaningsih, 2020) dalam memilih pemimpin daerah secara rasional terdiri atas: a. Mendapatkan keuntungan pribadi. b. memilih berdasarkan visi misi. c. memilih berdasarkan program kerja. d. memilih berdasarkan hasil ikut serta dalam kampanye. e. memilih berdasarkan pengalaman politik. f. memilih berdasarkan hubungan keluarga.

### **2.2.3 Kotak Kosong dan Latar Belakang Munculnya**

Dalam Demokrasi Pancasila, selain keputusan harus diprioritaskan untuk diambil secara musyawarah-mufakat, juga tidak boleh ada suatu keputusan yang diambil sendiri. Dengan memahami hal ini, sesungguhnya tidak perlu ada satu kelompok pun yang terlalu berambisi untuk tampil meraih mayoritas tunggal. Bahwa sebagai konsekuensi pemilu, menang dan kalah adalah termasuk hal lumrah, tetapi harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh dalam konteks Demokrasi Pancasila. Kita dapat memahami logika sistem ini, bahwa Demokrasi Pancasila tidak mengenal dikotomi partai pemerintah versus partai oposisi. Inilah yang menjadi bagian penting terhadap relevansi mayoritas tunggal dalam sistem Demokrasi Pancasila. Karena itu, tidak terlalu penting menghalalkan segala cara untuk meraih mayoritas tunggal, yang pada gilirannya akan menggolcirkan sistem Demokrasi Pancasila (Maarif, 2001).

Memasuki era Reformasi, terjadi empat kali perubahan UUD 1945 atau amandemen. Salah satu dari perubahan itu adalah mengubah mekanisme pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden serta untuk

mengisi kursi lembaga Legislatif. Penyelenggaraan pemerintah menganut sistem demokrasi Konstitusional. Mekanisme pengisian jabatan politik tertentu dalam pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilihan terhadap mekanisme pengisian jabatan politik tertentu dengan cara pemilihan langsung tidak lain agar pemerintah yang terbentuk mempunyai legitimasi luas (Widodo, 2015).

Untuk mengetahui penerapan system pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini perlu diterapkan di daerah-daerah di beberapa Negara dengan sistem presidensial;

1. *First Past the Post System*, system ini dikenal sebagai system sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah, karenanya system ini dikenal juga dengan system mayoritas sederhana. Konsekuensinya calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.
2. *Prefectial Voting System* atau *Approval Voting System*, cara kerja sistem ini adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, dan seterusnya terhadap calon-calon kepala daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal mengakomodasi sistem mayoritas sederhana namun dapat membingungkan proses perhitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.
3. *Two Round System* atau *Run-off System*, sesuai namanya cara kerja sistem ini pemilih dilakukan dengan dua putaran dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolute (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan

putaran pertama. Dua pasangan calon kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat mengikuti putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen, sistem ini paling populer di negara- negara Demokrasi Presidensial.

4. *System Electoral Collage*, cara kerja sistem ini adalah setiap daerah pemilihan diberi alokasi atau bobot suatu dewan pemilih sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah- daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah (Sari, 2017).

Ketika pemilihan serentak memulai ranah dalam pemilihan umum di Indonesia, maka polemik Fenomena calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya KPU) membuat putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Munculnya calon tunggal ini diakibatkan dengan adanya mahar dari berbagai partai politik yang sangat mahal, dan seketika latar belakang pasangan calon tunggal inilah yang menjadi fenomena dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Menurut Mahkamah Konstitusi, pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon (Widodo, 2015).

Kemunculan kotak kosong berbarengan dengan hadirnya calon tunggal pasca revisi UU No. 8 Tahun 2015 menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang

pilkada. Dasar perubahan tersebut dipicu oleh fenomena calon tunggal di beberapa daerah pemilihan yang menggelar pilkada serentak pada 2015. Kondisi tersebut membuat KPU kewalahan. Kasus serupa kembali lagi terjadi pada pilkada serentak kedua pada 2017. Dan untuk ketiga kalinya fenomena yang sama menggemparkan publik setanah air, pasca dilangsungkan pilkada serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Yang secara yuridis, fenomena ini tidak menyalahi aturan sebab ketentuan mengenai pasangan calon tunggal telah diakomodasi dalam pasal 54 C UU No. 10 Tahun 2016.

Walaupun dihadapkan dengan bumbung kosong (kotak kosong), calon tunggal tetap harus melalui semua tahapan dalam pilkada, sehingga calon tunggal akan tetap bekerja meyakinkan pemilih bahwa dia adalah pilihan yang tepat bagi pemilih. Dengan begitu, calon tunggal akan tetap berkampanye dan menyampaikan visi misinya, meskipun lawannya adalah kotak kosong. Meskipun melawan kotak kosong, tidak ada jaminan bahwa calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pasti akan menang (Rumestan, 2015).

#### **2.2.4 Teori Pilihan Rasional**

Dalam menguraikan fenomena ini, peneliti menggunakan teori pilihan rasional dari James S. Coleman. Teori ini dianggap relevan untuk menguraikan fenomena ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasional merupakan menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal, patut, dan layak. Jadi rasional merupakan suatu pikiran individu yang didasarkan pertimbangan akal sehat dan logis. Namun tiap individu memiliki latar belakang belakang yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan logis dan akalnya. Sehingga pendefinisian mengenai rasional merupakan pikiran yang didasarkan pada pertimbangan akal sehat sesuai dengan logika pribadi dari individu masing-masing.

Manifestasi dari pikiran rasional merupakan suatu tindakan. Namun setiap tindakan yang rasional diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Individu memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya. Suatu

tindakan yang dianggap rasional apabila pilihan yang diambil dari berbagai macam pilihan diambil yang paling mendekati atau sampai pada tujuan yang diinginkannya.

Seseorang sosiolog yang bernama James S. Coleman berusaha menguraikan fenomena di atas dalam teori pilihan rasionalnya. Teori pilihan rasional berpusat pada individu. Tiap individu dipandang mempunyai suatu tujuan dan maksud. Artinya tiap individu memiliki tujuan dan maksud dan setiap tindakan yang dilakukan oleh individu berdasar pada suatu maksud dan tujuan yang dimilikinya. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan individu atau apa yang menjadi sumber pilihan individu. Yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan individu (Ritzer. 2014).

Teori pilihan rasional memiliki dasar gagasan yaitu tindakan individu yang mengarah pada suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapainya. Dalam memantapkan gagasannya Coleman melihat aktor rasional dalam ilmu ekonomi yang melihat individu dalam melakukan tindakannya memaksimalkan kegunaan, ataupun keinginan, serta kebutuhan mereka. Dalam teori pilihan rasional Coleman terdapat dua unsur terpenting yaitu, aktor serta sumberdaya.

Sumber daya merupakan segala sesuatu potensi yang ada atau bahkan sampai dimiliki. Dalam hal ini sumber daya adaptasi berupa sumber daya alam, seluruh potensi alam yang dapat dimanfaatkan, serta segala potensi diri yang dimiliki si aktor. Sedangkan aktor dalam hal ini merupakan individu yang dapat memanfaatkan sumber daya tersebut.

Coleman dengan sangat jelas mengungkapkan bahwa aktor dianggap memiliki tujuan, sehingga dalam penentuan pilihannya didasarkan pertimbangan yang sangat baik dan mendalam berdasarkan logikanya. Dalam hal ini aktor pun memiliki kekuatan dalam menentukan pilihannya. Setiap individu memiliki sumber daya paling tidak sumber daya yang berasal dari potensi dirinya, yang dimana hal tersebut menjadi control penuh si aktor dan dapat diperuntukkan sesuai dengan keinginan si aktor.

Dalam hal ini Coleman menjelaskan interaksi aktor dan sumber daya sampai pada tingkatan sistem sosial. Pembentukan suatu sistem sosial paling tidak memiliki dua aktor yang bertinteraksi. Tentunya masing-masing dari aktor tersebut memiliki sumber daya yang dimiliki atau dikontrol. Dalam hal ini sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor tersebut tidak dimiliki oleh pihak lain. Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri kepada pihak lain sehingga perhatian tersebutlah menyebabkan kedua aktor saling berinteraksi sampai pada tahap saling bergantung satu sama lain.

Meskipun asumsi dasar dari teori pilihan rasional dari tujuan dan maksud aktor. Namun hal ini tak semata-merta pilihan yang diambil oleh individu dapat begitu saja dilakukan. Setidaknya terdapat dua hal utama yang dapat mempengaruhi tindakan individu yang merupakan representasi dari pilihan rasionalnya. Berikut uraiannya:

#### 1) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya merupakan hal yang sangat dipertimbangkan dalam menentukan pilihan rasionalnya. Meskipun setiap aktor memiliki sumber dayanya masing-masing. Namun tiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda serta akses yang berbeda terhadap sumber daya lainnya. Bagi, aktor yang memiliki sumber daya yang banyak ataupun memiliki akses yang luas terhadap sumber daya lainnya maka dalam mencapai tujuannya dapat lebih muda. Sedangkan bagi aktor yang memiliki sumber daya yang sedikit serta akses yang sempit terhadap sumber daya lainnya maka dalam mencapa tujuannya sangat sulit bahkan bisa saja mustahil.

#### 2) Lembaga Sosial

Tiap aktor tidak hidup dalam ruang hampa. Melainkan aktor hidup bermasyarakat yang dimana disetiap masyarakat paling tidak memiliki lembaga sosial. Bahkan dari lahir setiap individu sudah memasuki lembaga sosial yaitu keluarga. Setiap lembaga sosial pasti memiliki norma atau aturannya tersendiri yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil dalam menggapai yang diinginkan oleh si aktor.

### 2.2.5 Kerangka Konsep

Fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Makassar 2018 menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar memilih pemimpin berdasarkan preferensi individu semata, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Dalam sosiologi, perilaku pemilih dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional dimana faktor struktural dan kultural dalam masyarakat Makassar turut berperan dalam keputusan memilih kotak kosong.

Motivasi masyarakat tidak hanya berasal dari faktor politik, tetapi juga dari ketidakpuasan terhadap mekanisme demokrasi, ketidakpercayaan terhadap elite politik, dan keinginan untuk perubahan. Masyarakat melihat calon tunggal sebagai representasi oligarki politik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan rakyat.

Gerakan mendukung kotak kosong banyak dimotori oleh kampanye di media sosial yang efektif dalam membangun opini publik dan kesadaran kolektif. Konsep *Siri' na Pacce* dalam budaya Bugis-Makassar turut berperan dalam keputusan masyarakat memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara elite politik yang mengontrol kebijakan dan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak didengar.

Fenomena ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap politik uang dan praktik clientelism yang kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara pasif, tetapi secara aktif mengorganisir gerakan sosial sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang mereka anggap tidak adil. Masyarakat memilih kotak kosong sebagai strategi untuk mendapatkan calon pemimpin yang lebih berkualitas di masa mendatang. Jaringan sosial dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja turut memengaruhi keputusan politik individu.

Ketidakpuasan terhadap partai politik yang gagal melakukan kaderisasi kepemimpinan menjadi alasan lain masyarakat memilih kotak kosong. Kaum muda menjadi motor utama dalam gerakan kotak kosong dengan

memanfaatkan teknologi digital dan jaringan sosial mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan mampu menggunakan hak pilih mereka sebagai alat kontrol sosial.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Motivasi Masyarakat memilih Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar tahun 2018



## 2.3 Metode Penelitian

### 2.3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2010: 262). Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo,

dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realitas empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Tipe Penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Preferensi Sosial Pemilih Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 dalam melihat motivasi dan harapan masyarakat dalam memilih kotak kosong.

### **2.3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan episentrum dari fenomena pemilihan kotak kosong yang menjadi fokus studi ini. Sebagai kota terbesar di Indonesia Timur dengan populasi yang beragam dan dinamika politik yang kompleks, Makassar menawarkan konteks yang kaya untuk menganalisis preferensi sosial pemilihnya dalam Pilkada. Penelitian akan mencakup berbagai wilayah di Kota Makassar, yakni 15 kecamatan yang ada, untuk memastikan representasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini akan berlangsung selama 2 bulan yang akan dimulai pada minggu ketiga pada bulan September 2024 hingga minggu ketiga bulan November 2024.

### **2.3.3 Tahap-tahap Penelitian**

#### **a. Tahap Observasi Awal**

Pada tahap pertama ini, peneliti melakukan observasi dalam hal ini, dengan penelusuran dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang ada, serta fenomena atau kasus yang peneliti lihat atau saksikan pada lokasi penelitian, yaitu di masyarakat kota Makassar yang memilih kotak kosong pada tahun 2018.

#### **b. Pengurusan Surat Izin Penelitian**

Pada tahap kedua ini peneliti melakukan pengurusan surat izin dari pihak-pihak yang terkait untuk melengkapi dokumen penelitian dan menghindari segala permasalahan yang ada di lapangan pada saat proses pelaksanaan penelitian berlangsung.

c. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ketiga ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk meneliti informan yang merupakan fokus penelitian ini, yaitu masyarakat kota Makassar yang masuk dalam kategori pemilih kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018.

d. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Tahap ini berlangsung setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan, melakukan evaluasi terhadap data informasi yang diperoleh peneliti. Kemudian data yang valid dapat dimasukkan ke dalam laporan untuk menjawab permasalahan tersebut.

#### **2.3.4 Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor motivasional yang mendorong masyarakat Kota Makassar untuk memilih Kotak Kosong daripada pasangan calon tunggal yang tersedia pada Pilkada Kota Makassar 2018. Ini dapat mencakup: a. Analisis konteks sosial-politik Kota Makassar menjelang Pilkada 2018, b. Kajian tentang persepsi masyarakat terhadap kandidat yang tersedia, c. Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebelumnya, d. Identifikasi faktor-faktor kekecewaan politik yang mungkin memengaruhi keputusan pemilih, dan e. Pemahaman tentang tingkat kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

#### **2.3.5 Jenis dan Sumber Data**

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, tanpa pihak kedua, dan ini berfungsi sebagai data utama atau primer untuk penelitian. Adapun

data yang sumber data primer penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat kota Makassar yang menjadi pemilih kotak kosong pada pilkada tahun 2018.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder, yaitu semua sumber data yang berguna bagi penelitian namun diperoleh secara tidak langsung dan membutuhkan media perantara tertentu. Media perantara tersebut dapat berupa catatan orang lain, laporan jurnal penelitian dan jurnal ilmiah, buku dan majalah, bahkan artikel-artikel bebas yang diterbitkan melalui media massa, seperti koran, website, dan lain sebagainya (Marzuki, 1991)

### **2.3.6 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan dibantu oleh instrument lain yaitu pedoman wawancara dan observasi (Abdussamad, 2021). Oleh sebab itu, setelah menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, peneliti kemudian akan mengembangkan instrument sederhana yang dapat digunakan untuk memperoleh data pada sumber data yang lengkap, yang disertai dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang cermat dan valid serta memudahkan peneliti, maka perlu menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara seperti daftar pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya oleh peneliti sebelum terjun kelapangan, dan gadget handphone sebagai alat untuk mengambil dokumentasi dan alat perekam, dimana hal ini dikatakan sebagai alat pengumpulan data.

### **2.3.7 Informan Penelitian**

Informan penelitian menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif. Informan menyediakan informasi yang diperlukan dalam tujuan penelitian. Informan penelitian ini ditentukan berdasarkan prosedur *purposive* dengan menetapkan terlebih dahulu kelompok peserta yang dijadikan informan

(Sayidah, 2018). Kelompok tersebut terdiri dari pemilih yang memilih kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018.

Kriteria informan yang dipakai dalam penelitian ini mengikuti kriteria Spradley yaitu, a) enkulturasi penuh, informan mengetahui betul budaya kelompok dimana mereka tinggal, b) keterlibatan langsung, informan selalu melaksanakan aktivitas secara berulang-ulang, c) suasana budaya yang tidak dikenal, artinya informan bukan berasal dari daerah yang sama dengan peneliti, d) waktu yang cukup, informan tidak terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaannya sehingga mudah diwawancarai, dan e) non-analitik, artinya informasi dari informan bersifat data mentah (Endraswara, 2006).

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh gambaran yang komprehensif tentang preferensi sosial pemilih kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018, maka informan yang dinilai sesuai dengan kriteria penelitian adalah masyarakat kota Makassar yang memilih kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018. Kelompok ini akan menjadi sumber utama informasi mengenai motivasi dan harapan di balik pilihan mereka. Upaya akan dilakukan untuk memastikan keragaman dalam kelompok ini, meliputi variasi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial-ekonomi. Wawancara mendalam dengan kelompok ini akan memberikan pemahaman yang kaya tentang rasionalitas dan pertimbangan personal yang mendasari keputusan mereka.

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan, dengan jumlah tersebut dipilih karena data yang diperoleh sudah mencapai titik jenuh. Artinya, meskipun jumlah informan lebih banyak, hasilnya tidak akan memberikan informasi tambahan yang signifikan. Pemilihan sepuluh informan didasarkan pada prinsip triangulasi data dan triangulasi subjek. Triangulasi data menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tetap konsisten meskipun informan yang sama ditanya di waktu dan tempat yang berbeda. Sedangkan triangulasi subjek mengacu pada konsistensi jawaban meskipun pertanyaan yang sama diajukan kepada informan yang berbeda. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data pada informan kesepuluh, proses pengumpulan data

dianggap selesai, karena tidak ada penambahan informasi yang relevan (Idrus,2009).

Jumlah informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sepuluh orang, yang mewakili pemilih kota kosong pada pilkada Kota Makassar tahun 2018. Jumlah ini dipilih karena telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas data. Guba (dalam Idrus, 2009) mengemukakan tiga teknik untuk memastikan validitas dan reliabilitas, yaitu: memperpanjang waktu tinggal, melakukan observasi lebih teliti, dan melakukan triangulasi (Idrus, 2009). Spradley juga menyarankan bahwa sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria tertentu, yang memastikan data yang diperoleh representatif dan dapat dipercaya. Dengan demikian, sepuluh informan yang terpilih dianggap cukup untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang memperoleh pemahaman atau penguasaan terhadap suatu hal melalui proses enkulturasi, sehingga pengetahuan tersebut bukan hanya sekedar diketahui, tetapi juga dirasakan secara mendalam.
2. Mereka yang saat ini sedang aktif atau terlibat dalam kegiatan yang menjadi fokus penelitian.
3. Mereka yang memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi berdasarkan apa yang telah mereka "kemas" atau rangkum sebelumnya.
5. Mereka yang pada awalnya kurang akrab dengan peneliti, sehingga mereka lebih menarik untuk dijadikan sebagai sumber informasi atau narasumber dalam penelitian.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel dalam artian tradisional seperti penelitian kuantitatif, karena jumlah informan dalam penelitian kualitatif biasanya lebih sedikit. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria tertentu untuk memperkuat alasan pemilihan mereka sebagai subjek penelitian (Idrus, 2009). Mengingat tujuan penelitian

kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam, pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), dengan total sepuluh orang informan. Adapun menurut Bungin (2007), dalam penelitian kualitatif, jumlah informan dapat sedikit atau banyak, tergantung pada kecocokan pemilihan informan dan kompleksitas serta keragaman masalah yang diteliti.

Pada *purposive sampling*, jumlah sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan informasi yang diperoleh. Nasution menjelaskan bahwa penentuan unit sampel dianggap cukup apabila sudah mencapai tahap "redundansi" atau jenuh, di mana data yang diperoleh tidak lagi memberikan informasi baru (Sugiyono, 2017). Ketika data yang dikumpulkan memenuhi kriteria valid dan reliabel, maka proses pengumpulan data dianggap selesai karena sudah mencapai titik jenuh.

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No	Nama	L/P	Umur (Tahun)	Pekerjaan
1	Bapak SB	L	40	Dosen
2	Bapak AD	L	55	Dosen
3	Ibu AN	P	47	Notaris
4	Bapak YA	L	41	Aktivis
5	Bapak MT	L	43	Wiraswasta
6	Bapak DA	L	44	Pegawai Swasta
7	Bapak HS	L	48	Pengusaha
8	Bapak AZ	L	52	Wiraswasta
9	Ibu PD	P	45	IRT
10	Bapak RL	L	44	Aktivis

Sumber: Analisis Data Lapangan, 2024

### 2.3.8 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang preferensi sosial pemilih kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018. Prosedur pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi,

dengan tujuan untuk menghasilkan data yang kaya dan komprehensif. Berikut adalah tahapan dan metode pengumpulan data yang akan digunakan:

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan tertulis tentang suatu peristiwa, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait peristiwa tersebut, serta disusun secara sengaja untuk menyimpan informasi yang berkaitan. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, baik dalam bentuk tertulis, gambar, maupun data elektronik (Sukmadinata, 2007). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dari lokasi penelitian, baik yang mendukung ataupun yang mungkin bertentangan dengan informasi yang diberikan oleh informan. Dokumen yang dikumpulkan berupa data elektronik dan tertulis tentang fenomena kotak kosong pada pilkada kota Makassar tahun 2018, serta gambar-gambar yang diambil selama proses pengumpulan data bersama dengan informan.

b) Wawancara Mendalam

Wawancara dimaksudkan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian berupa informasi langsung dari informan. Dalam hal ini, peneliti bertemu langsung dengan informan dalam suatu proses tanya jawab untuk memperoleh data primer penelitian. Tanya jawab dilakukan secara langsung melalui ruang fisik dengan menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam. Setiap wawancara akan direkam (dengan izin informan) dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan "*In-depth Interview*", yang dimaksudkan agar proses wawancara menjadi lebih terstruktur, dengan terlebih dahulu menyiapkan pokok-pokok pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang disediakan berpusat pada motivasi dan harapan

dalam pilkada kota Makassar tahun 2018. Proses wawancara dalam penelitian ini dibantu oleh seseorang untuk mengambil dokumentasi gambar, lantaran peneliti membutuhkan bukti wawancara sebagai laporan telah turun lapangan.

### **2.3.9 Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menguji keabsahannya. Penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu sebuah Teknik pengabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain dari sumber utama. Triangulasi adalah sumber untuk memverifikasi keabsahan data yang memiliki sumber yang berbeda-beda. Triangulasi bertujuan untuk menguji keabsahan data mengenai Preferensi Sosial Pemilih Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018.

### **2.3.10 Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis data (Creswell, 2010: 276-284) dimulai dengan cara:

1. Mempersiapkan data yang akan dianalisis.
2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ditulis ke dalam bentuk transkrip wawancara.
3. Selanjutnya peneliti men-*coding* data ke dalam kategori-kategori.
4. Data kemudian direduksi sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.
5. Data kemudian ditulis dalam bentuk teks narasi (*display data*).
6. Melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan dan dianalisis tersebut.

## **2.4 Hasil dan Pembahasan**

### **2.4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial di kawasan Indonesia Timur. Kota Makassar memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun sosiologis, sehingga menjadikannya

ruang yang dinamis bagi kajian perilaku politik masyarakat dalam konteks demokrasi lokal.

Secara administratif, Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan, dengan tingkat heterogenitas sosial yang cukup tinggi. Penduduk Kota Makassar berasal dari berbagai latar belakang etnis, sosial, dan ekonomi, meskipun secara kultural didominasi oleh masyarakat Bugis dan Makassar yang memiliki nilai-nilai budaya kuat seperti *siri'* (harga diri), *pacce* (solidaritas sosial), dan semangat kemandirian. Nilai-nilai budaya tersebut tidak hanya membentuk relasi sosial masyarakat, tetapi juga mempengaruhi sikap dan perilaku politik warga dalam merespons dinamika kekuasaan dan kepemimpinan lokal.

Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, Makassar ditandai oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, pertumbuhan kelas menengah, serta akses informasi yang relatif terbuka. Kondisi ini turut membentuk masyarakat yang semakin kritis, rasional, dan partisipatif dalam proses politik. Tingkat literasi politik yang cukup baik, terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat perkotaan, menjadikan Makassar sebagai wilayah yang menarik untuk mengkaji rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Dalam konteks politik lokal, Kota Makassar memiliki sejarah panjang dinamika kontestasi elektoral yang kompetitif dan sarat konflik kepentingan elite. Pilkada Kota Makassar 2018 menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi lokal, ketika untuk pertama kalinya fenomena kotak kosong berhasil memenangkan kontestasi melawan pasangan calon tunggal. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis kepemiluan, tetapi juga menandai adanya ketegangan antara aspirasi masyarakat dengan proses politik yang berlangsung.

Fenomena kemenangan kotak kosong di Kota Makassar tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakatnya yang memiliki kesadaran politik tinggi serta keberanian untuk mengekspresikan ketidakpuasan secara kolektif melalui mekanisme demokratis. Kota Makassar menjadi representasi

ruang sosial di mana relasi antara elite politik, institusi demokrasi, dan masyarakat pemilih saling berinteraksi secara kompleks.

Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan substantif bahwa kota ini merupakan episentrum fenomena sosial-politik yang diteliti, sekaligus menyediakan konteks empiris yang kaya untuk memahami motivasi dan harapan masyarakat dalam memilih kotak kosong. Dengan cakupan wilayah penelitian yang meliputi berbagai kecamatan, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif variasi pandangan, pengalaman, dan rasionalitas pemilih dalam menghadapi situasi politik yang tidak ideal.

Kota Makassar bukan hanya berfungsi sebagai lokasi geografis penelitian, tetapi juga sebagai ruang sosial-politik yang merepresentasikan dinamika demokrasi lokal Indonesia, khususnya terkait preferensi pemilih, legitimasi politik, dan bentuk-bentuk partisipasi politik alternatif dalam pemilihan kepala daerah.

#### **2.4.2 Hasil Penelitian**

Dalam sejarah panjang Negara Indonesia dalam menganut sistem demokrasi dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, terdapat atau muncul sebuah polemik baru, yakni munculnya sebuah fenomena kotak kosong (biasa juga disebut dengan istilah Koko), yang oleh banyak orang dianggap sebagai sebuah keajaiban dalam proses berdemokrasi. Hal ini dianggap keajaiban karena banyak kalangan masyarakat menilai bahwa jika kandidat kepala daerah yang melawan kotak kosong, sudah bisa dipastikan 75% akan memenangi pemilihan. Namun, ini justru berbanding terbalik dengan prediksi masyarakat. Kekalahan calon tunggal pada pemilihan Walikota Makassar merupakan suatu bukti dan bentuk pembelajaran bagi kandidat calon yang punya keinginan bertarung dalam kontestasi 5 tahun sekali khususnya di Kota Makassar. Kemenangan kotak kosong ini tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga memotivasi masyarakat kota Makassar untuk memilih dan memenangkan kotak kosong pada pilkada tahun 2018.

#### 2.4.1.1 Faktor Motivasi: Mendapatkan keuntungan Pribadi

Salah satu aspek penting yang mendorong masyarakat Kota Makassar memilih kotak kosong adalah harapan untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik di masa depan. Masyarakat menyadari bahwa jika kotak kosong menang, maka akan diadakan pemilihan ulang dengan calon-calon yang baru selain dari yang sudah ada. Masyarakat memperhitungkan bahwa pilihan mereka terhadap kotak kosong akan membuka peluang munculnya calon-calon pemimpin yang lebih berkualitas. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Informan dengan inisial R yang berasal dari kecamatan Ujung Tanah. Informan R menyatakan sebagai berikut:

“....Pilkada sejatinya adalah wadah untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas, maka jika calonnya yang tidak berkualitas maka pilihan kotak kosong adalah sebuah keputusan tepat, intinya adalah kami mau calon yang berkualitas, kalau calonnya tidak berkualitas ya sudah pasti masyarakat akan lebih pilih kotak kosong....” (Wawancara dengan informan R, tanggal 15 Oktober 2024)

Dalam hal ini, informan melihat masyarakat kota Makassar merasa tidak puas dengan pilihan tunggal yang ada, dan berharap pada pemilihan ulang nanti akan muncul sosok pemimpin yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Untuk hal ini, Informan berinisial PD menyatakan sebagai berikut:

“....kita mau pemimpin yang mau bersaing sehat, susah sekali kalau ada pemimpin yang tidak mau bertanding, tidak mau ada lawannya dan itu bukan pemimpin yang kami mau....” (Wawancara dengan informan PD, tanggal 02 November 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dengan memilih pemimpin yang berkualitas akan membuat mereka merasa mendapatkan keuntungan secara pribadi, dimana ada kepuasan sendiri jika mereka memilih pasangan yang sesuai dengan kemauan mereka secara pribadi.

Selain dari adanya kepuasan karena memilih pasangan yang sesuai dengan kemauan masyarakat, perhitungan masyarakat memilih kotak kosong ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa lebih baik menunda pemilihan kepala daerah untuk sementara waktu daripada terpaksa memilih

pemimpin yang tidak sesuai harapan untuk lima tahun ke depan. Masyarakat menilai bahwa konsekuensi pemilihan ulang meskipun membutuhkan waktu dan biaya tambahan, masih lebih menguntungkan dibandingkan harus dipimpin oleh kepala daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Sesuai dengan pernyataan dari Informan berinisial S berikut ini:

“....lebih baik kita ini pilih kotak kosong daripada kita pilih pemimpin tidak berkualitas, saya lebih baik memilih lagi tahun depan daripada harus dipimpin sama pemimpin yang tidak sesuai dengan hati ku. Masa kita tega lihat Kota Makassar dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkualitas.....” (Wawancara dengan informan S, tanggal 25 Oktober 2024)

Meskipun masyarakat menyadari dengan pemilihan ulang akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan, tapi mereka merasa lebih puas dan merasa lebih diuntungkan karena mereka khawatir jika harus dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki kualitas.

#### 2.4.1.2 Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Visi Misi

Dalam konteks pemilihan berdasarkan visi dan misi, masyarakat Kota Makassar memilih kotak kosong dengan beberapa pertimbangan penting. Masyarakat menilai bahwa visi dan misi yang ditawarkan oleh pasangan calon tunggal tidak cukup meyakinkan dan kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota.

“....Visi misi yang ditawarkan kepada kita ini masyarakat tidak ada yang mengarah ke perubahan, begitu begitujuga terulang program yang mau dia buat, kita ini masyarakat makassar butuh perubahan salah satunya itu dilihat dari visi misi yang mau dia bawa nanti.....” (Wawancara dengan Informan YA, tanggal 30 Oktober 2024)

Visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon tunggal dinilai tidak memiliki program yang konkret dan terukur. Masyarakat merasa bahwa program-program yang ditawarkan cenderung normatif dan merupakan pengulangan dari program-program sebelumnya yang belum terbukti keberhasilannya. Misalnya, program tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dijelaskan secara detail bagaimana strategi pelaksanaannya.

“.....itu ji saja terus bagaimana caranya kasih naik perekonomian masyarakat tapi dari caranya sampaikan program nanti yang mau dia bawaan tidak jelas seperti apa nanti mau dia bikin.....” (Wawancara dengan informan AZ, tanggal 08 November 2024)

Masyarakat juga melihat adanya ketidaksesuaian antara visi misi yang diusung dengan kapasitas dan pengalaman pasangan calon tunggal. Beberapa program yang ambisius dinilai tidak didukung oleh *track record* yang memadai dari pasangan calon dalam mengelola program-program serupa sebelumnya. Hal ini menimbulkan keraguan akan kemampuan pasangan calon untuk mewujudkan visi misi yang dijanjikan.

“.....ragu sekali ka saya program yang mau dibawa pasangan calon bisa berhasil, sudah capek meki ini dijanji janji terus ragu ka bisakah dia penuh betul betul itu visi misinya nanti.....” (Wawancara dengan informan PD, tanggal 02 November 2024)

Selain itu, visi misi yang ditawarkan calon tunggal ini dianggap kurang memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Makassar. Permasalahan seperti kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, dan penataan kawasan kumuh tidak mendapat porsi yang memadai dalam program yang ditawarkan. Masyarakat menilai bahwa isu-isu mendasar ini seharusnya menjadi prioritas dalam visi misi calon pemimpin kota.

“.....secara pribadi Pak, saya rasa pasangan calon (tunggal) tidak memperhatikan dengan baik masalah masalah apa yang paling harus diselesaikan di kota Makassar, lihatmi makassar dimana mana macet, banjir, kami mau masalah-masalah seperti ini yang harusnya paling cepat bisa diselesaikan terlebih dahulu kasihan.....” (Wawancara dengan Informan S, tanggal 25 Oktober 2024)

Ketidaktejelasan sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan program juga menjadi pertimbangan masyarakat. Visi misi yang disampaikan tidak disertai dengan penjelasan detail tentang bagaimana program-program tersebut akan dibiayai dan dilaksanakan. Masyarakat khawatir program-program tersebut hanya akan menjadi janji kampanye tanpa implementasi yang nyata.

Dengan memilih kotak kosong, masyarakat berharap pada pemilihan berikutnya akan muncul calon pemimpin yang mampu menawarkan visi misi

yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan Kota Makassar. Mereka menginginkan program-program yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

#### 2.4.1.3 Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Ikut Kampanye

Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal dinilai kurang menyentuh aspirasi masyarakat luas. Kegiatan kampanye yang digelar cenderung bersifat seremonial dan kurang memberikan ruang dialog yang bermakna dengan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kampanye yang dilakukan lebih banyak berisi janji-janji politik tanpa penjelasan konkret tentang cara merealisasikannya.

“.....saya juga suka nonton nonton itu kalau kampanye, kayak itu massa dikasih kumpul saja terus tidak ada diskusi sama masyarakat. Jadi saya pribadi ini melihat kalau dia kampanye hanya akan kasih janji-janji saja karena dia saja tidak ada diskusi ke masyarakat toh tanyakan apa yang mereka butuhkan, mungkin ada tapi saya perhatikan tidak ada ruang terbuka yang dikasih....” (Wawancara dengan Informan MH, tanggal 15 November 2024)

Di sisi lain, gerakan kotak kosong justru melakukan kampanye yang lebih bumi dan interaktif. Para aktivis dan relawan kotak kosong menggelar diskusi-diskusi terbuka di berbagai wilayah, melibatkan masyarakat dalam dialog tentang masa depan Kota Makassar. Pendekatan kampanye yang lebih partisipatif ini berhasil menarik simpati masyarakat.

“.....saya mengaku saya masuk di timses yang ini kotak kosong, jadi gayanya kami mengkampanyekan kotak kosong itu dengan kasih ruang diskusi ke masyarakat, kita berikan pemahaman tentang masa depan kota Makassar kalau dipilih calon, jadi kami memang lebih mau kalau masyarakat aktif biar kita juga bisa tau apa yang masyarakat butuhkan....” (Wawancara dengan informan MT, tanggal 28 Oktober 2024)

Metode kampanye pasangan calon yang lebih mengandalkan kekuatan modal dan mobilisasi massa berbayar juga menuai kritik. Masyarakat melihat bahwa kampanye yang dilakukan lebih banyak

mengandalkan politik uang dan janji-janji material, bukan pada substansi program dan gagasan untuk membangun kota.

“.....karena dia memang latarbelakang nya pengusaha kan, yaa jadi saya lihat kampanye nya itu masyarakat mau ikut karena dibayar, sedangkan kami ini mau kalau setiap ada pemilihan calon walikota atau pemimpin daerah lah bisalah lebih jujur dan tidak pakai politik uang. Masa suaranya masyarakat mau dibeli dengan uang, jadi biarlah masyarakat memilih berdasarkan hati nya.....” (Wawancara dengan Informan S, tanggal 25 Oktober 2024)

Gerakan kotak kosong justru mampu membangun kampanye yang lebih edukatif dan substantif. Mereka aktif melakukan sosialisasi tentang makna demokrasi, pentingnya partisipasi politik yang cerdas, dan dampak jangka panjang dari pilihan politik masyarakat. Kampanye seperti ini lebih menarik bagi masyarakat yang sudah lelah dengan politik transaksional.

“.....jadi caranya kami sebagai relawan kotak kosong, kita kasih edukasi ke masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pentingnya itu mereka punya suara, bagaimana harus kita ini menjadi pemilih yang cerdas karena siapa kita pilih ini nanti akan punya dampak lima tahun ke depan untuk kita ini sebagai masyarakat kota Makassar.....” (Wawancara dengan informan MT, tanggal 28 Oktober 2024)

Keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis dalam kampanye kotak kosong juga memberikan legitimasi yang kuat. Mereka mampu menjelaskan secara rasional mengapa memilih kotak kosong bisa menjadi pilihan yang strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Kota Makassar. Kampanye kotak kosong juga berhasil memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas secara efektif. Pesan-pesan kampanye disebarkan melalui berbagai platform digital dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama pada kalangan muda.

“.....media sosial itu sangat berpengaruh dalam memberikan informasi tentang calon tunggal, dan lewat media sosial juga kita dikasih informasi terkait konsekuensi dari memilih kotak kosong, karena itu grup grup di WA waduh betul betul pro kontra orang di dalamnya.....” (Wawancara dengan informan YA, tanggal 30 Oktober 2024)

Faktor lain yang menarik adalah kampanye kotak kosong justru tidak membutuhkan biaya besar namun mampu menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Ini berbeda dengan kampanye pasangan calon tunggal yang dianggap menghamburkan dana namun gagal membangun koneksi emosional dengan pemilih. Keberhasilan kampanye kotak kosong ini menunjukkan bahwa masyarakat Makassar telah memiliki kedewasaan politik untuk menilai kualitas kampanye bukan dari kemewahan acaranya, melainkan dari substansi dan cara penyampaian pesannya kepada masyarakat.

#### 2.4.1.4 Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Pengalaman Politik

Masyarakat Kota Makassar menilai bahwa pengalaman politik pasangan calon tunggal belum cukup meyakinkan untuk memimpin kota metropolitan seperti Makassar. Rekam jejak politik calon yang ada dinilai tidak menunjukkan prestasi yang signifikan dalam membangun dan memajukan daerah sebelumnya. Beberapa kebijakan yang pernah diambil di masa lalu justru dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“.....saya tidak lihat ada sosok pemimpin di calon tunggal ini, sepak terjangnya juga dalam dunia politik setahu saya masih sangat kurang ya, jadi saya kurang percaya diri untuk pilih. Makassar ini kota maju ya salah satu kota besar di Indonesia, kalau dipimpin sama yang tidak berpengalaman kasihan juga kan ya orang sudah susah payah membangun ini kota jadi tidak bagus karena diganti sama yang tidak ada pengalaman.....” (Wawancara dengan informan S, tanggal 25 Oktober 2024)

Pengalaman calon dalam mengelola konflik politik dan sosial juga menjadi pertimbangan penting. Masyarakat melihat bahwa cara calon tunggal menangani berbagai persoalan politik di masa lalu cenderung tidak demokratis dan kurang mengedepankan dialog. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya gaya kepemimpinan yang otoriter jika terpilih sebagai kepala daerah.

“.....calon tunggal memang punya latar belakang pengusaha ya dan CEO PSM dan menantu dari pebisnis besar yang ada di Kota Makassar, jadi saya takutnya nanti lebih ke tidak demokratis karena

merasa sudah ada orang besar di belakangnya kan....” (Wawancara dengan informan YA, tanggal 30 Oktober 2024)

Masyarakat Kota Makassar melihat bahwa pasangan calon tunggal memiliki jejaring keluarga yang kuat dalam politik lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya dinasti politik yang dapat mengancam proses demokrasi di Kota Makassar. Masyarakat menilai bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga bisa menghambat munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih berkualitas. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa politik kekeluargaan seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak objektif dan cenderung menguntungkan kelompok keluarga tertentu. Masyarakat khawatir bahwa jika pasangan calon terpilih, penempatan jabatan strategis di pemerintahan akan lebih mengutamakan hubungan keluarga daripada kompetensi.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah pengalaman calon dalam mengelola anggaran publik. Beberapa kasus pengelolaan keuangan daerah di masa lalu yang kurang transparan membuat masyarakat meragukan kemampuan calon dalam mengelola APBD Kota Makassar yang cukup besar. Masyarakat juga melihat bagaimana calon bersikap terhadap kritik dan perbedaan pendapat selama perjalanan politiknya. Kecenderungan untuk tidak terbuka terhadap kritik dan lemahnya kemampuan mengelola perbedaan pendapat menjadi catatan negatif dalam rekam jejak politik calon.

“.....saya tidak suka karena kelihatannya dia kan anti kritik ya, karena kayak kasus ini dia laporkan orang, saya melihat dia tidak mau bersaing ya masa orang mau maju sebagai pemimpin baru (tapi) tidak mau ada saingannya, kita warga makassar sangat butuh juga pemimpin yang betul betul mau bawa makassar jadi lebih baik kasihan, kita mau semua program yang dibuat nanti betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada.....” (Wawancara dengan informan PD, tanggal 02 November 2024)

Dengan memilih kotak kosong, masyarakat berharap pada pemilihan berikutnya akan muncul calon pemimpin yang memiliki pengalaman politik yang lebih baik, teruji dalam mengelola pemerintahan, dan memiliki “track

record” yang bersih dalam pelayanan publik. Faktor pengalaman politik ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kota Makassar membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki pengalaman politik, tetapi juga memiliki kapasitas dan integritas yang teruji dalam memimpin.

#### 2.4.1.5 Faktor Motivasi: Memilih Berdasarkan Hubungan Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pilihan politik di Makassar. Banyak masyarakat yang memilih kotak kosong karena adanya diskusi dan pertimbangan bersama dalam lingkup keluarga. Orang tua, kakak, atau anggota keluarga yang dipercaya seringkali menjadi rujukan dalam menentukan pilihan politik.

“.....saya ikut terpengaruh sama keluarga juga karena mereka banyak yang memilih kotak kosong, lingkungan tempat nongkrong dan tempat tinggal juga banyak sekali yang memilih kotak kosong, jadi memang pengaruh lingkungan itu juga menjadi salah satu indikator memilih.....”  
(Wawancara dengan informan MH, tanggal 15 November 2024)

Dalam konteks Pilkada Kota Makassar 2018, banyak keluarga yang melakukan diskusi intensif tentang kualitas pasangan calon tunggal. Anggota keluarga yang lebih memahami situasi politik, seperti mereka yang berpendidikan tinggi atau aktif dalam kegiatan sosial, seringkali memberikan pandangan kritis yang mempengaruhi pilihan seluruh anggota keluarga.

“.....saya awalnya mengira kalau yang pilih kotak kosong sedikit, tapi ternyata kalau saya cerita-cerita mau itu di rumah, di warkop sama teman-teman, banyak yang suka ini kotak kosong, jadi dari cerita-cerita itu bertambah lagi informasi dan lebih terbuka saya punya pikiran jadi akhirnya makin mantap saya memilih kotak kosong....”  
(Wawancara dengan informan R, tanggal 15 Oktober 2024)

Fenomena yang menarik adalah bagaimana generasi muda dalam keluarga justru mempengaruhi orang tua mereka untuk memilih kotak kosong. Para mahasiswa atau pekerja muda yang memiliki akses informasi lebih luas mampu menjelaskan kepada keluarga mereka tentang pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekedar mengikuti arus politik.

“.....ada pengaruh, jangankan dari teman dan komunitas. Anak saya saja sudah kasih saya informasi tentang ini pilkada 2018 kemarin, mungkin karena dia punya akses informasi di media sosial jadi banyak dapat informasi. Jadi kami ini yang sudah tua suka juga dapat informasi dari anak.... (Wawancara dengan informan YA, tanggal 30 Oktober 2024)

Keputusan memilih kotak kosong juga sering menjadi keputusan bersama satu keluarga. Ketika kepala keluarga atau anggota keluarga yang dihormati memutuskan untuk memilih kotak kosong, anggota keluarga lain cenderung mengikuti dengan pertimbangan menjaga keharmonisan dan kesatuan pandangan dalam keluarga. Selain itu, pengalaman politik keluarga di masa lalu juga mempengaruhi keputusan memilih kotak kosong. Keluarga-keluarga yang pernah kecewa dengan kepemimpinan politik sebelumnya cenderung mendorong anggotanya untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes dan harapan akan perubahan yang lebih baik.

#### **2.4.2 Pembahasan Penelitian**

Fenomena kemenangan kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018 merupakan peristiwa yang menarik untuk dianalisis dengan menggunakan teori pilihan rasional dari James Coleman. Teori ini menekankan bahwa tindakan individu mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau preferensi. Coleman berpendapat bahwa individu melakukan tindakan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam konteks memilih kotak kosong di Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, masyarakat bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak hanya memilih berdasarkan dorongan emosional, tetapi melalui kalkulasi yang matang tentang keuntungan dan kerugian dari pilihan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2021) yang menemukan bahwa "pemilih urban semakin kritis dalam menentukan pilihan politik mereka dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara rasional."

Aspek keuntungan pribadi menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat Makassar dalam memilih kotak kosong. Mereka memperhitungkan bahwa dengan memilih kotak kosong, mereka berpeluang mendapatkan calon pemimpin yang lebih berkualitas pada pemilihan ulang berikutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan inisial "R", masyarakat menginginkan calon yang berkualitas dan memilih kotak kosong ketika merasa calon yang ada (waktu itu) tidak memenuhi kriteria tersebut.

Penelitian Suryanto (2020) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa "masyarakat perkotaan cenderung menggunakan hak pilih mereka sebagai instrumen negosiasi untuk mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas." Hal ini menunjukkan bahwa pilihan terhadap kotak kosong merupakan bentuk investasi politik jangka panjang yang dilakukan masyarakat.

Faktor visi misi juga menjadi pertimbangan rasional lainnya dalam pengambilan keputusan. Masyarakat Makassar menilai bahwa visi misi yang ditawarkan pasangan calon tunggal tidak konkret dan tidak menjawab permasalahan mendasar kota. Penelitian Widodo (2022) menemukan bahwa "tingkat pendidikan dan akses informasi yang tinggi di wilayah urban membuat pemilih lebih kritis dalam mengevaluasi program yang ditawarkan calon pemimpin."

Temuan menarik lainnya adalah bagaimana masyarakat melakukan analisis mendalam terhadap *track record* dan pengalaman politik calon. Seperti yang diungkapkan Informan S, masyarakat meragukan kemampuan calon tunggal dalam memimpin kota metropolitan seperti Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2023) yang menyatakan bahwa "pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam preferensi pemilih urban."

Aspek kampanye juga menjadi pertimbangan rasional masyarakat. Pendekatan kampanye kotak kosong yang lebih edukatif dan partisipatif dinilai lebih meyakinkan dibandingkan kampanye konvensional yang mengandalkan kekuatan modal. Penelitian Kusuma (2021) menunjukkan

bahwa "metode kampanye yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lebih efektif dalam mempengaruhi preferensi pemilih dibandingkan kampanye yang bersifat transaksional."

Pengaruh kelompok dan jaringan sosial, yang merupakan salah satu elemen penting dalam teori Coleman, terlihat jelas dalam proses pengambilan keputusan masyarakat Kota Makassar. Penelitian Hakim (2022) mengungkapkan bahwa "keputusan politik di wilayah urban semakin dipengaruhi oleh diskusi dan pertukaran informasi dalam kelompok-kelompok sosial, baik secara langsung maupun melalui media digital."

Media sosial menjadi sarana efektif dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Seperti yang diungkapkan Informan YA, grup-grup WhatsApp menjadi wadah diskusi yang intens tentang pilihan kotak kosong. Hal ini diperkuat oleh penelitian Pratiwi (2023) yang menemukan bahwa "media sosial berperan signifikan dalam membangun kesadaran kolektif dan membentuk rasionalitas pemilih urban." Aspek edukasi politik yang dilakukan oleh relawan kotak kosong menunjukkan bagaimana informasi menjadi sumber daya penting dalam pengambilan keputusan rasional. Menurut penelitian Sirajuddin (2021), "pemilih yang mendapatkan informasi komprehensif tentang konsekuensi pilihan politik mereka cenderung membuat keputusan yang lebih rasional."

Kekhawatiran akan terbentuknya dinasti politik juga menjadi pertimbangan rasional masyarakat. Seperti yang diungkapkan Informan YA, latar belakang calon tunggal yang memiliki koneksi dengan pebisnis besar menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kepemimpinan yang tidak demokratis. Penelitian Gunawan (2022) menegaskan bahwa "resistensi terhadap politik dinasti semakin menguat di kalangan pemilih urban yang berpendidikan." Faktor transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik menjadi pertimbangan rasional lainnya. Masyarakat memperhitungkan risiko memilih pemimpin yang tidak memiliki *track record* yang baik dalam pengelolaan keuangan. Penelitian Mahmud (2023)

menunjukkan bahwa "pemilih di kota besar semakin mempertimbangkan aspek kompetensi manajerial calon dalam mengelola anggaran publik."

Keterbukaan terhadap kritik dan kemampuan mengelola perbedaan pendapat juga menjadi faktor penting dalam kalkulasi rasionalitas pemilih. Seperti yang diungkapkan Informan PD, masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu menerima kritik dan bersedia bersaing secara sehat. Penelitian Syafrudin (2022) menemukan bahwa "sikap anti-kritik calon pemimpin berkorelasi negatif dengan preferensi pemilih urban." Faktor keluarga dalam pembentukan preferensi politik menunjukkan bagaimana rasionalitas individu juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam unit terkecil di masyarakat. Penelitian Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa "keluarga masih menjadi agen sosialisasi politik yang efektif, namun dengan pola yang lebih dialogis dan rasional."

Menariknya, peran generasi muda dalam mempengaruhi preferensi politik keluarga menunjukkan pergeseran pola pengambilan keputusan yang lebih rasional. Seperti yang terungkap dari wawancara, anak-anak muda dengan akses informasi yang lebih luas mampu memberikan pertimbangan rasional kepada orang tua mereka. Penelitian Azizah (2023) menegaskan bahwa "generasi muda urban berperan penting dalam mentransformasi preferensi politik keluarga menjadi lebih rasional." Aspek kolektivitas dalam pengambilan keputusan juga menunjukkan bagaimana rasionalitas individu berinteraksi dengan norma sosial. Penelitian Yusuf (2022) menemukan bahwa "keputusan politik dalam konteks urban modern merupakan hasil interaksi antara pertimbangan rasional individu dan dinamika sosial dalam komunitas."

Faktor kepercayaan terhadap institusi politik juga mempengaruhi kalkulasi rasional pemilih. Penelitian Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa "tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik berkorelasi positif dengan kecenderungan untuk membuat pilihan politik yang lebih kritis dan rasional." Evaluasi terhadap kinerja politik di masa lalu menjadi bagian dari pertimbangan rasional masyarakat. Seperti yang terungkap dari wawancara,

pengalaman kekecewaan terhadap kepemimpinan sebelumnya mempengaruhi kalkulasi pilihan politik. Penelitian Rasyid (2022) menunjukkan bahwa "memori kolektif tentang kinerja politik masa lalu mempengaruhi rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politik."

Aspek keadilan dan pemerataan pembangunan juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Sutanto (2023) menemukan bahwa "pemilih urban semakin mempertimbangkan aspek keadilan distributif dalam mengevaluasi program-program yang ditawarkan calon pemimpin." Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya tanpa mengandalkan kekuatan modal juga menunjukkan rasionalitas kolektif masyarakat. Seperti yang terungkap dalam penelitian, kampanye kotak kosong berhasil tanpa menggunakan dana besar. Penelitian Kurniawan (2022) menegaskan bahwa "efektivitas gerakan politik tidak selalu berkorelasi dengan besarnya sumber daya finansial yang digunakan."

Faktor kredibilitas dan integritas calon juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Suharto (2023) mengungkapkan bahwa "pemilih urban semakin mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam mengevaluasi kualitas calon pemimpin." Aspek keberlanjutan pembangunan juga menjadi bagian dari kalkulasi rasional pemilih. Penelitian Wibowo (2022) menemukan bahwa "pemilih di kota besar semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam mengevaluasi program-program pembangunan yang ditawarkan."

Faktor independensi dan netralitas birokrasi juga mempengaruhi kalkulasi rasional pemilih. Penelitian Permana (2023) mengungkapkan bahwa "kekhawatiran akan politisasi birokrasi mempengaruhi preferensi politik masyarakat urban." Kemampuan untuk mengelola konflik dan keragaman juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Santoso (2022) menemukan bahwa "kapasitas calon pemimpin dalam mengelola keragaman sosial menjadi faktor penting dalam preferensi pemilih urban."

Aspek inovasi dan kreativitas dalam penyelesaian masalah kota juga mempengaruhi rasionalitas pemilih. Penelitian Utami (2023) mengungkapkan

bahwa "pemilih urban semakin mempertimbangkan kapasitas inovatif calon pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan kota." Faktor komunikasi politik juga menjadi pertimbangan rasional pemilih. Penelitian Putra (2022) menemukan bahwa "gaya komunikasi politik yang dialogis dan substantif lebih efektif dalam mempengaruhi preferensi pemilih urban."

Berdasarkan analisis yang menggunakan teori pilihan rasional Coleman dan didukung oleh berbagai penelitian terkini, dapat disimpulkan bahwa kemenangan kotak kosong di Makassar merupakan hasil dari kalkulasi rasional masyarakat yang mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan politik masyarakat urban semakin kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politik mereka.

## **2.5 Kesimpulan**

Masyarakat Makassar menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap diskualifikasi pasangan petahana Danny Pomanto-Indira Mulyasari, yang dianggap tidak adil dan lebih bernuansa kepentingan politik daripada alasan hukum yang objektif. Pilihan kotak kosong menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi politik oligarki, terutama terhadap pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang dianggap mewakili kepentingan elite bisnis dan politik. Kekecewaan terhadap elite politik yang dianggap hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu mendorong masyarakat untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes.

Masyarakat Makassar menunjukkan kedewasaan politik dengan tidak memilih kandidat yang mereka anggap tidak kompeten atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Kampanye dukungan terhadap kotak kosong banyak dilakukan melalui media sosial, dengan gerakan seperti #KolomKosong yang menjadi viral di kalangan pemilih muda dan masyarakat sipil. Nilai budaya Bugis-Makassar, seperti siri' (harga diri) dan pacce (solidaritas sosial), turut mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menolak pasangan calon tunggal yang mereka anggap tidak mewakili aspirasi rakyat.

Banyak pemilih kotak kosong berharap agar Pilkada dapat diulang dengan menghadirkan lebih dari satu pasangan calon, sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan yang lebih beragam. Masyarakat merasa bahwa program dan visi-misi pasangan calon tunggal kurang meyakinkan dan tidak memberikan solusi nyata terhadap permasalahan Kota Makassar. Kaum muda dan aktivis menjadi motor utama dalam gerakan kotak kosong, dengan mengorganisir diskusi publik dan melakukan kampanye yang menekankan kesadaran politik.

Keputusan masyarakat memilih kotak kosong menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengikuti arus politik, tetapi juga menuntut proses demokrasi yang lebih adil dan representatif. Masyarakat menilai bahwa partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan, sehingga hanya mampu menghasilkan calon tunggal yang dianggap kurang kredibel. Diskusi dalam keluarga dan komunitas turut berperan dalam membentuk pilihan politik masyarakat, dengan banyaknya warga yang memilih kotak kosong karena dorongan dari lingkungan terdekat mereka. Fenomena kemenangan kotak kosong di Makassar menjadi pembelajaran penting bagi daerah lain bahwa masyarakat memiliki kuasa untuk menolak pemimpin yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka dan bahwa demokrasi memberikan ruang bagi bentuk protes politik yang sah.

## **2.6 Daftar Pustaka**

- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). *Modern Sociological Theory*. SAGE Publications. Dalam Bahasa Indonesia: Teori Sosiologi Modern, (Yogyakarta: Kencana, 2014)
- Doyle P. Johnson, *Teori sosial moderen dan klasik*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pusataka Utama, 1988)
- Soekanto, Soerjono (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-49. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono (1985). *Max Weber, Konsep-konsep Dasar Dalam Sosiologi*. Jakarta Raja Grafindo Perkasa, 1985.
- Kuper, Adam (1996). *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial* / Adam Kuper, Jessica Kuper; penerjemah, Harismunandar, et.al. Edisi.1, cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2000.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.

- Nimmo, D. (2004). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Rosdakarya.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 250/K/TUN/PILKADA/2018.
- Putusan PTTUN Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS
- Suandi Maarif, *Demokrasi Teistis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Heru Widodo, *Perselisihan Hasil Pilkada Serentak* (Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Rizki Ananda Sari, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017" *Tesis* (Tebing Tinggi, Universitas Sumatera Utara, 2018)
- Iza Rumesten, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi" *Tesis* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2015)
- Hamalik, Oemar. (2019). *Psikologi Belajar Dan Mengajar*. Sinar Baru Algesindo.
- Husdarta, HJS. (2019). *Psikologi Olahraga*. Alfabeta.
- Husdarta. 2019. *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Alfabeta.
- Handoko. 2019. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Dengan Variabel Pemediasi. Vol 1 No. 1.
- Satiadarma, M. P. (2018). *Dasar-Dasar Psikologi Olahraga*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. (2018), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Buku kedua
- Maslow, A. H. (2013). *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT. PBP.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Endraswara. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Edisi Kedua)*. Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian. Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Zifatama Jawa.
- Marzuki. (1991). *Metodologi Riset*. BPFU-UUI.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2010). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publication.